

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Riview Penelitian Terahulu

Beberapa penelitian yang dilaksanakan oleh beberapa peneliti sebelumnya telah dilakukan untuk mengetahui pengelolaan variaabel-variabel yang dapat mempengaruhi SAKIP. Tabel berikut menunjukkan hasil pengujian yang dilakukan:

Tabel 2.1
Daftar Penelitian Terdahulu

NO.	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Metode penelitiin	Hasil
1.	Wiwik andriani dkk (2015)	Penerepan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Politeknik Negeri Padang	Penelitian kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Kinerja Sub Komponen Renstra <ol style="list-style-type: none"> a) Renstra sudah menggambarkan dengan jelas visi, misi, tujuan, sasaran, program, indikator kinerja sasaran dan target jangka menengah dan sudah mengacu kepada Renstra di atasnya. b) Sasaran strategis yang ditetapkan sudah berorientasi pada hasil. c) Mengenai implementasi Renstra sudah digunakan dalam acuan untuk penyusunan dokumen perencanaan tahunan dan telah telah dilakukan reuiu secaraberkala. 2. Komponen Pengukuran Kinerja Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal, namun IKU unit kerja belum disusun. 3. Komponen pelaporan kinerja

				<p>a) Pemenuhan pelaporan, dokumen LAKIP Politeknik Negeri Padang telah disampaikan tepat waktu ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.</p> <p>b) Penyajian informasi kinerja, LAKIP telah menyajikan mengenai kemajuan pencapaian target jangka menengah</p> <p>c) Pemanfaatan, informasi yang disajikan sudah digunakan dalam perbaikan perencanaan, perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, peningkatan kinerja dan untuk penilaian kinerja.</p> <p>4. Komponen Evaluasi Kinerja Dengan adanya Permenpan dapat digunakan sebagai pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja. Evaluasi akuntabilitas kinerja atas unit kerja di lingkungan Politeknik Negeri Padang belum dilakukan, sehingga belum tersedianya penilaian atas akuntabilitas kinerja unit kerja tersebut, meskipun tetap ada evaluasi program, namun hal tersebut hanya terbatas pada program kegiatan saja.</p> <p>5. Komponen Pencapaian Kinerja Organisasi. Target kinerja output dan outcome belum seluruhnya dapat tercapai</p>
2.	Jajang Badruzaman (2012)	Penerapan Implementasi SAKIP terhadap Penerapan Good Governance (Studi pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas)	Penelitian kualitatif	<p>1. Perencanaan Kinerja Capaian pemenuhan indikator perencanaan Kinerja Badan keuangan daerah Kabupaten kepulauan Anambas Tahun 2019 memperoleh nilai evaluasi 27,13 dari bobot nilai 30 yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - . Dokumen perencanaan strategis (Renstra 9,63 dari nilai maks 10 - . Dokumen perencanaan kinerjan (RRT) 17,50 dari nilai 20 <p>2. Pengukuran Kinerja</p>

				<p>Hasil pemenuhan pengukuran kinerja dikategorikan sangat baik dikarenakan Badan keuangan daerah Kab. Kepulauan Anambas telah melaksanakan pengukuran kinerja dengan memonitoring implementasi SAKIP setiap triwulan yang diukur sampai pada eselon III dan IV serta didokumentasikan dengan baik.</p> <p>3. Pelaporan Kinerja Hasil evaluasi atas pelaporan kinerja menunjukkan bahwa pelaporan kinerja sudah dibuat dan dikirimkan tepat waktu serta menggambarkan keberhasilan dan kegagalan perjanjian kinerja tahun 2019, namun terdapat kelemahan yang perlu diperbaiki dan perbandingan lain yang diperlukan</p> <p>4. Evaluasi Kinerja Hasil evaluasi atas evaluasi internal sudah baik. Badan keuangan daerah Kab. Kepulauan Anambas telah melaksanakan evaluasi internal dengan adanya pemberian punishment, namun belum memberikan reward target yang telah berhasil ataupun melebihi target serta SOP dan dokumentasi pelaksanaan evaluasi internal yang baik.</p> <p>5. Capaian Kinerja Hasil evaluasi atas pencapaian kinerja sudah baik, namun masih dibutuhkan perbaikan pada informasi capaian kinerja tahun sebelumnya.</p>
3.	Dendy Syaiful (2016)	Pengaruh Implementasi SAKIP terhadap Penerapan Good Governance (Studi pada	Penelitian kuantitatif	<p>1. SAKIP pada BKPLD Kab Tasikmalaya sudah diimplementasikan dengan sangat baik. Penelitian tersebut menggunakan 5 komponen SAKIP</p> <p>2. Good Governance pada BKPLD Kab Tasikmalaya</p>

		BKPLD Kab Tasikmalaya)		sudah diterapkan dengan sangat baik. Penilaian tersebut menggunakan 8 prinsip Good Governance
4.	Hasni Yusrianti dan Rika Henda Safitri (2015)	Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang	Penelitian kuantitatif	Penilaian pelaksanaan SAKIP dikota Palembang menunjukkan 6 kelas, 13 SKPD di kelas buruk, dan bahkan 3 SKPD di kelas buruk. Hal ini dapat diartikan sebagai pencapaian tingkat pelaksanaan SAKIP dan LAKIP SKPD Kota Palembang secara umum berada pada tingkat klasifikasi yang buruk dan sangat membutuhkan pendampingan dalam penyusunan LAKIP.
5.	Muh. Irfandy (2020) Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Pemerintah Kab Gunung Kidul		Penelitian kualitatif	<p>1. Perencanaan Kinerja Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi terhadap RPJMD, RKT dan Perjanjian Kinerja diperoleh informasi bahwa sasaran dan indikator kinerja daerah masih banyak yang belum berorientasi <i>outcome</i> atau masih berorientasi <i>output</i>.</p> <p>2. Pengukuran Kinerja Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Gunungkidul masih memiliki masalah terkait banyaknya indikator yang berorientasi <i>output</i>.</p> <p>3. Pelaporan Kinerja Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, Jumlah anggaran untuk penyusunan laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul adalah sebesar Rp. 38.130.000</p> <p>4. Evaluasi kinerja Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, Pemerintah Daerah Kabupaten</p>

				<p>Gunungkidul melaksanakan evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah. Sedangkan analisis capaian kinerja dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran strategis serta hambatan/masalah dan strategi pemecahan masalah.</p> <p>5. Capaian kinerja Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, capaian sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul berdasarkan indikator yang ditetapkan, sebagian besar telah terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan.</p>
--	--	--	--	--

Penelitian ini merupakan tindak lanjut dari penelitian dari Wiwik andriani dkk (2015) yang menggunakan SAKIP dan good governance sebaagai variabel independen dan organisasi pemerintah sebagai variabel dependen. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Jajang Badruzaman (2012), Dendy Syaiful (2016), Hasni Yusrianti dan Rika Henda Safitri (2015) yang terletak pada subjek da ojek penelitiannya dimaa instansi pemerintah yang melakukan SAKIP di Kabupaten Jombang salah satunya ada di kantor Kecamatan Kabuh.

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Penerapan Good Governance

Bersatu dalam membangun pemerintahan yang baik adalah syarat bagi pemerintah untuk mewujudkan suara masyarakat dan mencapai tujuan dan cita-cita negara. Good governance merupakan akuntabilitas pemerintah terhadap pelayanan publik yg efisien, bentuk manajemen yang andal, dan aparat yang bertanggungjawab kepada masyarakat. Good governance adalah suatu pemikiran yang memfokuskan pada proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk memenuhi suara rakyat dan mencapai tujuan dan cita-cita bangsa. Good Governance adalah demokrasi pasar dan implementasi manajemen pembangunan yg sehat dan bertanggung jawab di samping pasar yg efisien, menghindari salah peruntukan sumber daya investasi yang kurang dan korupsi di tingkat politik sekalipun administratif, dan juga melaksanakan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas kewirausahaan (OECD dan World Bank dalam LAN, 2004).

Akuntabilitas pemerintah yang diwujudkan melalui penerapan SAKIP sangat penting dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip good governance untuk mendapatkan keyakinan yang wajar bahwa tujuannya suatu perusahaan atau kegiatan tertentu telah tercapai dan dapat dicapai untuk mencegah hilangnya sumber daya. Good governance memuat pemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan penyelenggaraan administrasi nasional yang baik. Badan good governance memiliki tiga badan dominan: negeri

(negara bagian/pemerintah), sektor swasta (sektor swasta atau bisnis), dan arakat (komunitas), yang masing-masing berfungsi.

Adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah untuk menyikapi dan memanfaatkan secara seksual konsep-konsep di atas, khususnya pelaksanaan Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota). Mulai dimaksimalkan perannya, bersaing dari menjadi pionir dari perencana, menyalurkan dana APBD untuk mengimplementasikan nilai entrepreneurial governance sebagai contoh konkrit good governance. Namun, pada tataran implementasi sangat mengecewakan karena masih banyak kelemahan tata kelola dan implementasi birokrasi. Peningkatan kualitas perangkat dan kinerja pelayanan publik yang masih jauh dari impian dan keinginan rakyat, pemborosan yang tidak dapat diperbaiki, masih maraknya korupsi yang dilakukan oleh para birokrat.

Good governance ialah salah satu pembahasan perdebatan atau isu penting, sehingga menyebabkan pertanyaan mengenai kemampuan good governance di organisasi pemerintah. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan SAKIP di instansi pemerintah. Hal ini tidak hanya meningkatkan kinerja, tetapi juga melahirkan kawasan akuntabilitas yang didorong dan dipantau.

Prinsip-prinsip good governance yang dikembangkan oleh UNDP adalah:

a. Partisipasi

Partisipasi berarti semua warga negara ikut serta dalam proses pemungutan putusan, baik secara langsung sekalipun lewat organisasi yang mewakili kepentingan mereka.

Partisipasi tersebut didasarkan pada berbicara dan berpartisipasi secara konstruktif dengan Freedom of Association

b. Taat Hukum/Rule of Law

Taat hukum / Rule of Law dilaksanakan dalam bentuk kerangka hukum yang adil, tanpa diskriminasi, terutama sesuai dengan undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan HAM.

c. Transparansi

Transparansi diciptakan di atas Informasi yang bebas. Informasi tentang prosedur pemungutan keputusan dan pelaksanaan pekerjaan organisasi dapat diterima dan dipahami oleh mereka yang membutuhkannya dan dapat dipantau.

d. Responsitif

Responsitif ialah suatu instansi pemerintah/badan usaha harus berusaha melayani stakeholders-nya dengan memenuhi keinginan masyarakat.

e. Akuntabilitas

Akuntabilitas berarti bahwa pengambil keputusan pemerintah, sektor pariwisata, dan masyarakat sipil bertanggungjawab kepada rakyat dan badan pemangku keperluan. Akuntabilitas ini bergantung pada sifat badan dan keputusan yang diambil, baik keputusan tersebut dibuat utk kepentingan internal atau eksternal organisasi.

2.2.2 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006, Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan misi dan fungsi pokok, serta pelaksanaan kebijakan dan program yang dibentuk dan dikembangkan dalam rangka pengelolaan sumber daya. Setiap organisasi pemerintah menurut akuntabilitas yang sistematis nilai SAKIP sangat penting bagi suatu daerah, terutama provinsi, kota, atau negara bagian. Jika nilai yang dicapai di daerah baik, kami akan mendapatkan poin atau reward dari Menpan dan RB terkait sebagai pertimbangan realisasi pembangunan daerah. Jika skor di masing-masing daerah rendah, mungkin tidak mendapat perhatian dari pemerintah pusat, tetapi pemerintah akan terus memantaunya.

Sesuai PP No 29 Tahun 2014 Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) merupakan berbagai rangkaian sistematis dari aktifitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk penetapan dan pengumpulan data, serta pelaporan kinerja kepada organisasi pemerintah terkait akuntabilitas dan peningkatan kinerja prosedur dari organisasi pemerintah. Sistem akuntabilitas pemerintah pada dasarnya merupakan alat yang dipergunakan oleh suatu organisasi pemerintah untuk menjalankan kewajibannya menjelaskan berhasil tidaknya suatu misi organisasi yang terdiri dari 5 komponen, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja.

Pelaksanaan SAKIP terdiri dari lima unsur berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja adalah prosedur pembuatan rencana kinerja sebagai rincian fondasi dari tujuan dan keijakan yang ditentukan dalam rencana strategis yang dilakukan oleh organisasi pemerintah melewati beraneka program setiap tahun. Rencana kinerja menetapkan sasaran kinerja tahunan agar semua indeks kinerja yang ada pada tingkat target. Program dalam rencana kinerja ini ditetapkan pada setiap awal tahun anggaran dan dijamin dapat dicapai oleh instansi dalam waktu satu tahun.

b. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja ialah suatu tata kelola yang dipergunakan untuk mengemangkan kualitas pemungutan keputusan dan akuntabilitas dalam rangka menilai keberhasilan/ kegagalan perwujudan kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan dalam rangka mewujudkan visi organisasi pemerintah. Berikutnya dilaksanakan penguraian akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterlibatan pencapaian kinerja kegiatan dan kebijakan dalam rangka mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi seperti yang ditentukan dalam rencana stratejik. Pengukuran kinerja dipakai sebagai asas untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi pemerintah. Pengukuran dimaksud dengan hasil dari suatu evaluasi yang terancang dan berdasarkan dikelompok indeks kinerja program yang berupa indeks masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, sebagaimana dijabarkan pada bab sebelumnya. Evaluasi tersebut tidak

terhindar dari sistem yang merupakan program mengadaptasi masukan menjadi keluaran atau evaluasi dalam sistem penyusunan kebijakan yang dianggap penting dan berdampak terhadap perwujudan sasaran dan tujuan.

c. Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja ialah ikhtiar yang menjelaskan secara singkat dan lengkap mengenai capaian kinerja yang telah dirncanakan menurut perencanaan kinerja yang diteapkan dalam rangka penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).

Laporan kinerja yang dirancang dan disusun mengenai informasi uraian ringkas instansi, rencana dan sasaran kinerja yang telah ditentukan. Bentuk laporan kinerja berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan bentuk pertanggungjawaban berisikan pengetahuan tentang capaian kinerja dan hambatan penyelenggaraan rencana kinerja.

Tujuan pelaporan kinerja adalah untuk memberikan keterangan kinerja yang telah diukur terhadap pemberi amanah atas kinerja yang sudah dan sepatutnya dicapai. Serta sebagai upaya penyempurnaan yang berkesinambungan bagi lembaga aparatur guna meningkatkan kinerjanya

d. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja ialah program untuk mengevaluasi atau melihat keberhasilan/ kegagalan suatu organisasi dalam melakukan tugas dan fungsi yang ditugaskan kepadanya. Evaluasi kinerja diartikan analisis dan interpretasi keberhasilan/ kegagalan perolehan kinerja. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja, hasilnya bertautan dengan sumber daya (input) yang berada dibawah kekuasaannya seperti

SDM, dana/keuangan, sarana prasarana metode kerja dan hal lainnya yang berkaitan (LAN, 2000:1). Program ini untuk melihat dan memahami pencapaian realisasi setiap indeks kinerja kegiatan, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam menggapai visi dan misi agar dapat memulai dan diteliti untuk pembetulan kinerja dalam melakukan program/kegiatan yang akan datang. Kemudian dikerjakan analisis efisiensi dengan cara membandingkan antar output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi sehingga dapat mempersemahkan gambaran tingkat efisiensi yang dilaksanakan oleh organisasi tersebut.

e. Capaian Kinerja

Pencapaian kinerja berbasis menggambarkan kandungan pokok akuntabilitas kinerja, yang terpenting disampaikan untuk menghasilkan gambaran yang memenuhi perihal hakikat dari akuntabilitas itu sendiri tentang kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan mewujudkan kinerja serta peranan seorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu lembaga kepada pihak yang mempunyai hak untuk menuntut klarifikasi atau pertanggungjawaban.

Dalam permasalahan ini setiap organisasi pemerintah secara berkala wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategi organisasi kepada semua stakeholders, yang dimasukkan memakai LAKIP

2.2.3 Implementasi Sistem Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)

Sebagaimana disusun dalam Keppres Nomor 7 Tahun 1999, penerapan sistem pengukuran kinerja mencontoh pemerintah Indonesia atas pemerintahan negara lain yang dianggap lebih progresif. Perbaikan pegawai negeri dilakukan bukan karena tujuan efisiensi, tetapi karena menjadi simbol pemerintahan yang baik. Oleh karena

itu, peniruan yang dilakukan dapat membatasi organisasi pada ritual formal dan menerapkan mekanisme kerja yang berorientasi non-material (March dan Olsen 1976; DiMaggio dan Powell 1983; Tolbert dan Zucker 1983; Gudono 2014).

Sihaloho dan Halim (2005) memperkirakan bahwa niat untuk menggunakan sistem pengukuran kinerja didominasi oleh tekanan eksternal dari sebagian besar lembaga pemerintah. Kravchuk dan Schack (1996) menyatakan bahwa organisasi pemerintah kadang kala menemui kendala dan hambatan seperti peredaav definisi data, teknologi kemudahan akses dan jumlah data diperoleh utuk membuat LAKIP. Gates (1999) mengemukakan bahwa masalah pokok yang sering ditemui dalam menerapkan sistem pengukuran kinerja strategik adalah mengabaikan untuk mengukur kegiatan yang susah, memperkirakan hal yang benar yang salah, dan mengukur hal yang salah dengan benar. Hal ini kadang kala menghambat keberhasilan implementasi sistem pengukuran kinerja.

Implementasi SAKIP dan good governance sangat erat kaitannya, mengingat pelaporan SAKIP merupakan tipikal metode reformasi dan SAKIP sebagai alat akuntabilitas/pertanggungjawaban/kewajiban membagika jawaban (LAN dan BPKP, 2000:10). SAKIP sebagai alat untuk mencapai tata good governance. SAKIP sebagai respon atas tantangan akuntansi sektor publik dalam mencapai akuntabilitas publik, dan tata kelola yang baik adalah tujuan akhir SAKIP (LAN dan BPKP2000: 13).

2.3 Kerangka Konseptual

Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) bertujuan untuk meningkatkan akuntabilias para aparatur negara. SAKIP merupakan berbagai

rangkaian sistematis dari aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk penetapan dan pengumpulan data, serta laporan kinerja kepada organisasi pemerintah terkait akuntabilitas dan peningkatan kinerja prosedur dari organisasi pemerintah. SAKIP menjadikan organisasi pemerintah lebih terarah dengan rangkaian program yang sistematis.

Dasar pemikiran yang melandasi penelitian ini adalah mengetahui penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam menunjang good governance di Kecamatan Kabuh pada tahun 2020 apakah mengalami kendala dalam penerapannya dan pelaksanaannya, dikarenakan pada tahun 2020 Kecamatan Kabuh mendapatkan nilai B dari hasil evaluasi SAKIP. Berdasarkan teori dan agenda penelitian diatas, penulis mengembangkan kerangka konseptual. Kerangka konseptual ditunjukkan pada Gambar 2.1

